



Menuju Jateng Satu

PILGUB
JATENG
2018

H-81



Pilgub Kaku, Beku, dan Wagu

Oleh Nur Hidayat Sardini

ADA yang kurang dengan pelaksanaan Pilgub Jateng kali ini. Selain kurang marak dan gairah (gereget), Pilgub seperti bukan agenda penting politik masyarakat Jawa Tengah.

Alat peraga kampanye tidak terpampang, apalagi forum-forum dialogis kelompok dan antarkelompok yang memperdebatkan visi, misi, dan program kontestan seperti Pilgub-Pilgub lalu. Ini kaku, beku, dan wagu.

Dari sudut dinamika kepentingan khalayak pemilih, Pilgub Jawa Tengah kali ini rampung sebelum pelaksanaan. Ada apa dan mengapa?

Terdapat tiga faktor menjadi penyebab. Pertama, faktor kultur politik. Saya memandang, faktor ini menjadi platform politik manusia Jawa, *ewuh pakewuh*. Prinsip ini memuat ajaran tidak mau repot, atau perasaan tidak enak. Debat dalam konteks budaya Jawa, bukanlah sesuatu yang baik, kendatipun tidak ada larangan.

Dalam *ewuh-pakewuh*, ada tata krama. Orang berdebat, berbeda pandangan yang disampaikan secara terbuka, adalah hal tak elok. Dalam tata krama, implisit ungkapan sopan-santun. Orang yang sering mengkritik saudaranya, adalah orang yang tak tahu unggah-ungguh. Dalam konstruksi sosial masyarakat Jawa, orang yang diam, penurut, dan berada dalam kepasrahan tingkat tinggi (*pasrah bongkokan*) adalah lebih baik daripada sebaliknya. Apakah orang Jawa tidak berkehendak menyelesaikan tiap masalah dalam relasi sosial dan politik? Sangat ada dan jelas. Namun, penyelesaian tiap masalah lebih baik secara tertutup, dalam prinsip yang kadang dimanipulasi: *ana rembug dirembug*.

Mereka yang blak-blakan, eksplisit, dan tanpa *tedeng aling-aling* dalam menyelesaikan permasalahan, berarti belum jadi orang Jawa (*urung njawani*).

Konstruksi sosial itu merembes ke ranah publik, seperti Pilgub.

Kedua, kemajuan teknologi informasi dan informasi. Efek kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, mendorong orang merasa tersalurkan melalui rupa-rupa perangkat media sosial. Orang boleh jadi merasa nyaman bila menyampaikan pendapat,

ungkapan, aspirasi, dan seluruh isi hati lewat perangkat-perangkat itu. Bahkan, kebanyakan orang blak-blakan bila menyampaikan hal-hal seperti itu melalui media sosial, namun saat pertemuan kebanyakan hanya diam seribu bahasa.

Dinamika di media sosial memang membuat Pilgub Jateng tidak seluruhnya dalam gambaran beku, kaku, dan wagu. Namun kabar buruknya, berdasar data survei Asosiasi Penyelenggara

Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2017, pengguna internet termasuk media sosial di Jawa Tengah, termasuk kategori rendah. Untuk kawasan desa/rural (48,25%), sedangkan untuk area desa-kota/rural urban 49,49%.

Efek Rembesan

Ketiga, akibat efek rembesan air (*effect of water seepage*) Pilkada DKI Jakarta. Efek itu mengalir ke mana-mana, hingga ke wilayah Jawa Tengah.

Efek rembesan memuat gambaran dinamika Pilkada DKI yang buram, penuh kebencian, prasangka, bermuansa konflik etnik dan religi, serta mengaduk-aduk emosi kesatuan dan kebangsaan kita. Dalam arti positif, gambaran profil Pilkada DKI Jakarta mendorong daya adaptasi dan daya antisipasi. Namun dalam makna negatif, rembesan pesan seperti itu menumbuhkan daya penolakan, kesan momok, sekaligus mematikan prakarsa, gagasan, dan dinamika masyarakat dalam Pilgub Jateng.

Siapa rugi jika Pilgub beku, kaku, dan wagu? Pemilih adalah pihak yang paling dirugikan karena tidak memiliki cukup kesempatan untuk menimbang, dan mempreferensikan profil para pasangan calon dalam Pilgub kali ini. Apakah kesempatan sudah habis? Dalam agenda KPU Jateng, bakal digelar Debat Kandidat tiga putaran. Debat terbuka ditayang *live* oleh sejumlah stasiun televisi nasional. Saya rasa, di kesempatan itu rakyat pemilih dapat memperoleh jawaban informasi dan seluk-beluk mengenai para calon. Semoga saja.

- Dr Nur Hidayat Sardini SSos MSI, Sekretaris Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Diponegoro

